



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023. Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi



pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya sehingga upaya mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang Sejahtera dan Bermartabat cepat tercapai.

**Kotapinang, Maret 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2
	1. Geografi dan Demografi Wilayah	2
	2. Organisasi Perangkat Daerah	4
C.	Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan	8
D.	Peran Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11
E.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
A.	Perencanaan Kinerja	16
B.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	18
C.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	19
D.	Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan	24
	1. Visi	24
	2. Misi	25
E.	Tujuan dan Sasaran	26
F.	Indikator Kinerja Utama	30



G.	Rencana Kinerja	32
H.	Perjanjian Kinerja	40
I.	Rencana Anggaran	41
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	44
A.	Akuntabilitas Kinerja	45
B.	Pengukuran dan Capaian Kinerja IKU 2023	54
C.	Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	59
BAB IV	PENUTUP	133
	LAMPIRAN	139



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	3
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	4
Tabel 1.3	Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	9
Tabel 1.4	Upaya Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	10
Tabel 1.5	Hubungan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	13
Tabel 2.1	Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Labuhanbatu Selatan	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	30
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Labuhanbatu Selatan	41
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	46
Tabel 3.2	Mekanisme Perhitungan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2023	50
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	54
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Tahun 2023	61
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023	63
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Opini Atas LKPD Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.6	Peringkat Capaian Kinerja Opini atas LKPD 2023 Dalam wilayah Sumatera Utara Tahun 2023	
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.8	Peringkat Capaian Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam wilayah Sumatera Utara Tahun 2023	



Tabel 3.9	Capaian Kinerja Rata rata lama sekola Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.14	Capaian KinerjaTingkat Kemiskinan Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Pertumbuhan Investasi Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Kepatuhan Terhadap RTRW dan RDTR Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Periode RPJMD	
Tabel 3.19	Realisasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pendidikan Tahun 2023	
Gambar 2.1	Pola Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	
Gambar 3.1	Pola Hubungan Kinerja Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah setiap tahun kepada publik. Laporan kinerja menjadi alat pertanggungjawaban pemerintah dalam merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan anggaran sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah. Penyelenggaraan kinerja juga memperhatikan pedoman evaluasi yang berfungsi memberi arah pengendalian atas perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Pedoman evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 selain memberi arahan dalam melaksanakan evaluasi kinerja bagi para evaluator, sekaligus memberi batasan dan arah bagi penyelenggara pemerintahan untuk merumuskan proses kinerja agar lebih terkendali dan tepat sasaran serta memenuhi unsur kualitas.

Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menggambarkan lingkup proses kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam satu periode jangka pendek dan menggambarkan perkembangan capaian dalam satu periode jangka menengah. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi dan alat ukur atas keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang dibebankan atas penggunaan anggaran.



Memasuki era transparansi diikuti dengan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme perencanaan yang terarah, menetapkan alat ukur kinerja yang tepat, evaluasi yang komprehensif, dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023, Anggaran dan Realisasi tahun 2023, dan mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 berisi ikhtisar proses pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru, Realisasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023.

B. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

A. Geografi dan Demografi Wilayah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 33



Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak antara 1°26'00" - 2°12'55" Lintang Utara dan 99°40'00" - 100°26'00" Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 500m dpl. Kabupaten ini secara administratif terbagi atas 5 kecamatan, 54 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.596 km² atau sama dengan 4,93 % dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Secara administratif, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki wilayah administratif yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Kampung Rakyat, dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Data Wilayah Administratif
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelu- rahan	Desa	Luas / Area (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sungai Kanan	Langga Payung	1	8	558,96	15,54
2.	Torgamba	Aek Batu	-	14	1311,46	36,47
3.	Kotapinang	Kotapinang	1	9	556,71	15,48
4.	Silangkitang	Aek Goti	-	6	350,48	9,75
5.	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	-	15	818,39	22,76
		Jumlah	2	52	3596	100

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2023 (BPS Kab. Labuhanbatu Selatan)

Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang



diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 mencapai 328.472 dengan kepadatan penduduk 89,08 jiwa per Km², dengan sebaran sebagaimana dalam Tabel berikut:

**Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**

Kecamatan	Luas km²	%	Jumlah Penduduk	%	Kepadatan Penduduk (Orang/km²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sungai Kanan	558,96	15,54	50.478	15,37	90,31
Torgamba	1311,46	36,47	115.765	35,24	88,27
Kotapinang	556,71	15,48	65.593	19,97	117,82
Silangkitang	350,48	9,75	32.139	9,78	91,70
Kampung Rakyat	818,39	22,76	64.497	19,64	78,81
Jumlah	3596	100	328.472	100	91,34

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2023 (BPS Kab. Labuhanbatu Selatan)

B. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 33 Perangkat Daerah yang bertugas menjabarkan dan melaksanakan visi, misi dan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat 33 Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari :



a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin seorang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) asisten masing-masing Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan dibantu 10 (Sepuluh) Kepala Bagian masing-masing;

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinir 3 Bagian yang terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinir 3 Bagian yang terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinir 4 Bagian yang terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Sekretariat DPRD

- a. Bagian Umum dan Keuangan
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

c. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :

Dinas Tipe A	
1)	Dinas Pendidikan
2)	Dinas Kesehatan



3)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4)	Dinas Sosial
5)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
8)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Tipe B

1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2)	Dinas Ketenagakerjaan
3)	Dinas Perhubungan
4)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
5)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6)	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dinas Tipe C

1)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2)	Dinas Komunikasi dan Informatika
3)	Dinas Lingkungan Hidup
4)	Dinas Perhubungan

d. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :

Badan Daerah Tipe A

1)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



3)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
----	-------------------------------------

Badan Daerah Tipe B	
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2)	Badan Pendapatan Daerah
3)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

e. Kecamatan

Kecamatan Tipe A	
1)	Kecamatan Torgamba
2)	Kecamatan Kampung Rakyat

Kecamatan Tipe B	
1)	Kecamatan Kotapinang
2)	Kecamatan Sungai Kanan
3)	Kecamatan Silangkitang

f. Kelurahan

Kelurahan	
1)	Kelurahan Kotapinang
2)	Kelurahan Langgapayung

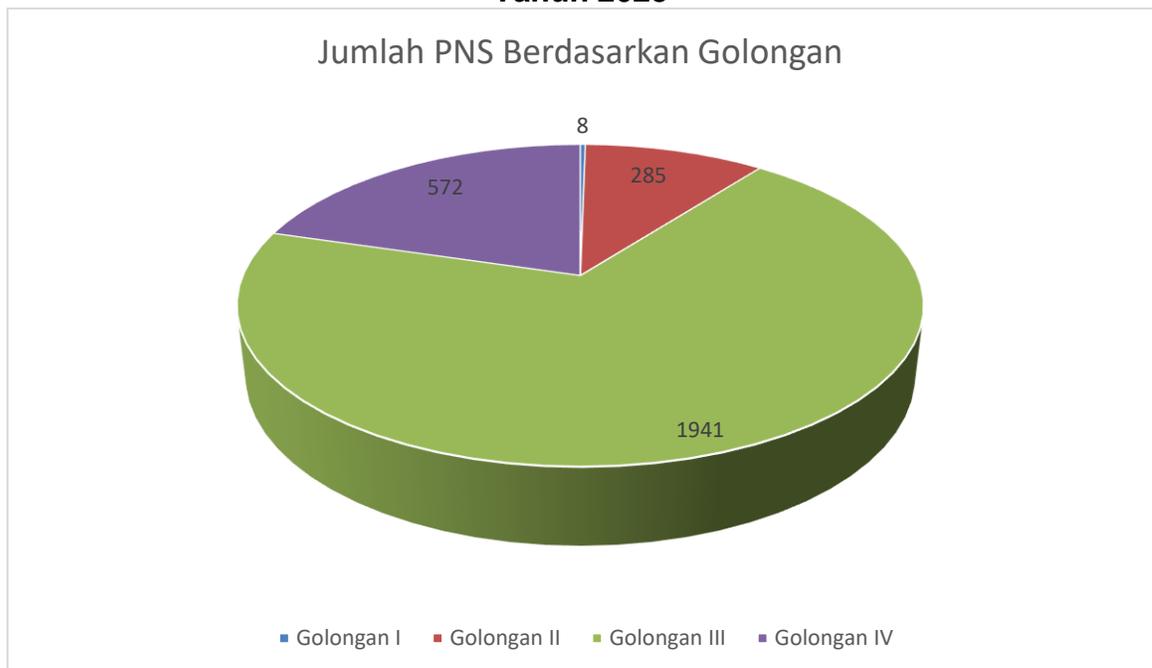
g. Personil/Pegawai

Dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 mempunyai personil/Pegawai Negeri Sipil berjumlah 2.806 orang pegawai (Sumber: BKPSDM Labusel 2023). Salah satu instrumen penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah



kuantitas dan kualitas pegawai yang memadai, sesuai dengan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta kompetensi. Berikut disajikan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan golongan.

Grafik 1.1
Jumlah PNS
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2023



Sumber: BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023

C. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yaitu: **birokrasi yang bersih dan akuntabel**; **birokrasi yang kapabel**; dan **pelayanan publik yang prima**. Reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah/unit perangkat daerah. Pengungkapan capaian reformasi birokrasi sebagai bagian dari Laporan Kinerja



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimaksudkan untuk menambah informasi atas upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam tahun 2023 guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkinerja tinggi, meskipun capaian reformasi birokrasi masih memerlukan upaya peningkatan dalam beberapa aspek.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut. Tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka telah dilakukan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 nilai Refomasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Penilaian	Bobot (%)	2023
A	RB General	100	39,83
B	RB Tematik	20	8,06
C	Indeks RB	120	47,89
			C

Sumber : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/629/RB.06/2024



Dan telah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat skor PMPRB dengan kategori “C”.

Hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan. Sebagai bentuk usaha peningkatan reformasi birokrasi dengan berkaca kepada hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023, maka akan direncanakan upaya untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

**Tabel 1.4
Upaya Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024**

NO	UPAYA	OUTPUT
1	Penyusunan Rencana Kerja RB Daerah dan Unit	Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja RB
2	Penyusunan Rencana Aksi RB Daerah dan Unit	Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi
3	Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2022-2024
4	Menyusun Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis Pemda dan OPD	Penyusunan Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis sedang dalam proses
5	Sosialisasi dan pelatihan Asesor	Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
6	Sosialisasi Pengisian LKE dan Standar Bukti Pendukung	Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Mei 2024.



7	Pernyataan Komitmen dukungan Agenda Reformasi Birokrasi pada level Kepala Perangkat Daerah	Pernyataan Komitmen belum terlaksana dan akan dilaksanakan tahun 2024
8	Pemberdayaan fungsi Kelompok Kerja RB	Dilaksanakan dalam rapat kerja
9	Pemantapan Implementasi Budaya Kerja	Disampaikan pada momen apel dan upacara
10	Peningkatan frekuensi dan keterlibatan pimpinan perangkat dalam dalam evaluasi pelaksanaan RB Unit Kerja	Upaya peningkatan Kinerja RB disampaikan pada momen rapat koordinasi

Dengan adanya upaya-upaya yang terukur didukung rencana kerja dan rencana aksi yang terarah dalam mengungkit capaian reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menargetkan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024.

D. Peran Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peran yang strategis karena merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang termasuk ke dalam simpul strategis Jalur Timur Pulau Sumatera karena Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak di pertengahan antara Kota Medan dan Kota Pekanbaru. Jarak Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Kota Medan adalah ± 337 Km dan jarak Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Kota Pekanbaru adalah ± 308 Km. Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dicapai melalui transportasi darat karena terletak di jalan lintas sumatera. Keberadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi sangat penting dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa yang akan menjadi salah satu indikator penunjang perekonomian.

1. Peran Strategis dalam Aspek Perekonomian di Sumatera Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terdiri dari pertanian tanaman pangan,



perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan, dimana potensi ini dimasa mendatang akan menjadi andalan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam sektor perekonomian Sumatera Utara yang dalam hal ini telah menyumbangkan PDRB mencapai 37.584,31 milyar rupiah pada tahun 2023. Kontributor utamanya merupakan sektor industri pengolahan sebesar 41,84%, diikuti sektor pertanian sebesar 30,81% serta sektor perdagangan besar dan eceran 13,02 % dan sektor-sektor lainnya 14,33%.

2. Peran Strategis dalam Aspek Pembangunan di Sumatera Utara

Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki peranan dalam mendukung Rencana Pembangunan di Sumatera Utara melalui hubungan sinkronisasi rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 juga telah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini bisa tergambarkan dalam Tabel berikut:



Tabel 1.5
Hubungan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan terhadap Rencana Pembangunan Provinsi
Sumatera Utara

Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
Misi 2 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
Misi 3 : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
Misi 4 : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif,



	berdaya saing, dan mandiri.
Misi 5 : Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
Misi 6 : Menciptakan sinergi pembangunan dibidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup.	karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3. Peran Strategis Dalam Aspek Pemerintahan di Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memberikan dukungan dalam mewujudkan Sumut Bermartabat melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini diupayakan dengan melaksanakan reformasi pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu pada area Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

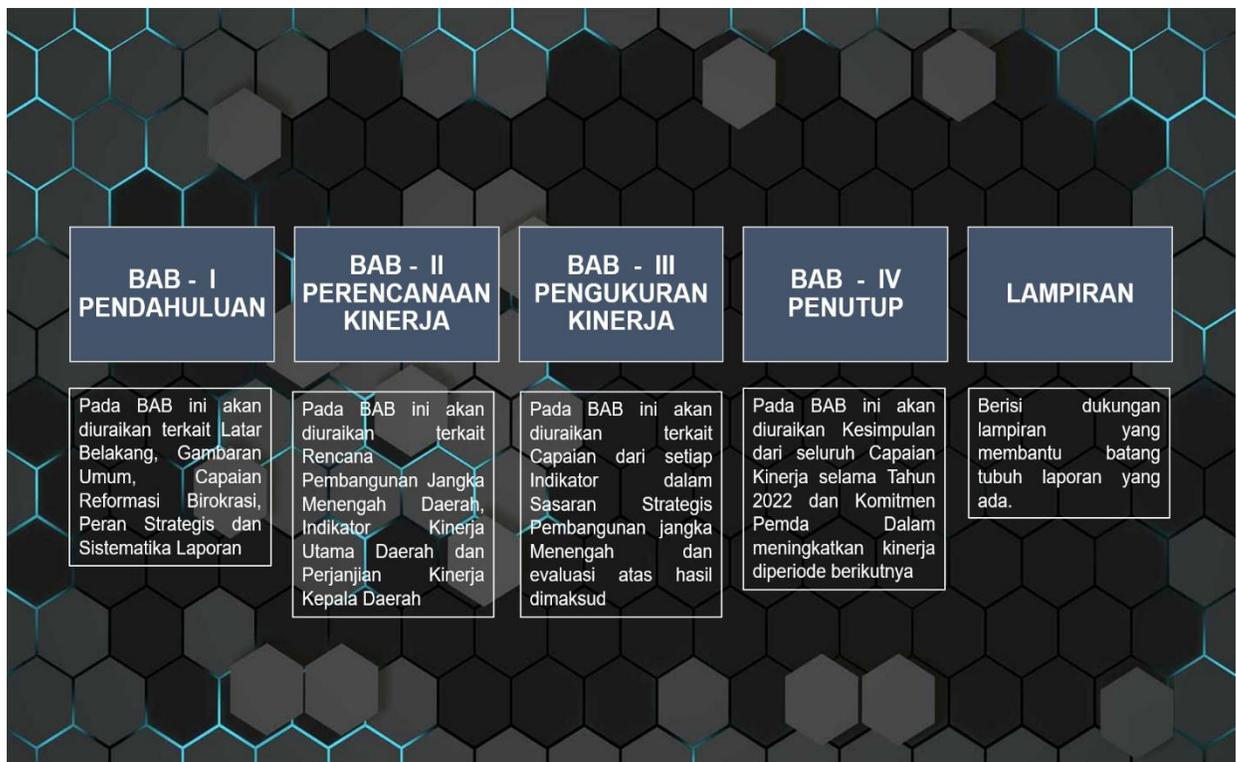
E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29



Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Tujuan Pembangunan Kabupaten adalah mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten sebagai bagian dari masyarakat nasional berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Indikator penting kemajuan dan kemakmuran masyarakat yang ingin dicapai adalah meningkatnya perekonomian, menurunnya angka kemiskinan, tumbuh dan berkembangnya sektor industri, terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas serta menciptakan tata kelola pemerintahan berkinerja tinggi dan akuntabel.

Pembangunan Kabupaten yang berkualitas membutuhkan perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan solusi atas masalah pembangunan. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan sasaran strategis daerah. Pemerintah Daerah memerlukan penetapan indikator kinerja sebagai alat ukur yang disiapkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Selain berfungsi sebagai arah pembangunan Lima Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2021 – 2026, juga dimaksudkan untuk mendukung kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sekaligus memandu proses pembangunan kabupaten secara demokratis, sistematis, terarah, terpadu, komprehensif dan antisipatif serta partisipatif.

Sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap seluruh kegiatan program dan kebijaksanaan. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa sendiri untuk mengelola sumber daya daerah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah ditetapkan selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 dan mendukung sinkronisasi terhadap sasaran Pembangunan Nasional. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang



terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang selektif, mempedomani prioritas dan terukur.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi untuk selanjutnya memperhitungkan isu strategis yang ada untuk menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis lima tahunan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan melandasi penetapan program dan kegiatan prioritas setiap tahunnya. Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis daerah membutuhkan indikator kinerja utama yang spesifik, dapat dicapai, dapat diukur, relevan dan tepat waktu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP Nasional periode 2005 – 2025 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara periode 2005 - 2025, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disahkan melalui Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman menuju keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur dari terpenuhinya capaian indikator dari setiap sasaran strategis pembangunan daerah. Kualitas rencana pembangunan lima tahunan sangat ditentukan dari keakuratan pemetaan masalah utama pembangunan sebagai sasaran perbaikan dan pemecahan/solusi yang dapat diukur keberhasilannya.

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun tema pembangunan ataupun tema RKPD Tahun 2023 adalah **“Penguatan SDM yang Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan.”**

Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021- 2026 juga dilakukan sinkronisasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 serta dipertajam dari hasil evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022.

Dari tema tersebut ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut

- a. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- b. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga



- kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan.
 - d. Penjaringan *stake holder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - e. Penetapan / legalisasi perencanaan penanganan banjir, penataan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
 - f. Penetapan/legalisasi perencanaan revisi rencana induk sectoral infrastruktur dasar.
 - g. peningkatan kualitas SDM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
 - h. Optimalisasi peran serta *stake holder* dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.
 - a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar;
 - b. Peningkatan Produksi Pangan;
 - c. Peningkatan Infrastruktur Dasar;
 - d. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan;
 - e. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk mewujudkan tema pembangunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 maka dirumuskan program prioritas, yang telah mempertimbangkan program prioritas Nasional, Provinsi dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya, Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas provinsi dan nasional Tahun 2023. Prioritas provinsi dan nasional tahun 2023 tidak sama persis dari sisi nomenklatur dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023, namun



secara substansi selaras antara provinsi, nasional dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.1
Prioritas Pembangunan Tahun 2023
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pendukung
1	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program pengelolaan perikanan budidaya
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial (Fasilitasi bantuan sosial)
		Program Rehabilitasi Sosial
3	Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
4	Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5	Peningkatan kuantitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



	dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas
6	Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan berbasis karakter dan teknologi Informasi	Program pengelolaan pendidikan
		Program pendidik dan tenaga pendidik
		Program Pengembangan Kurikulum
7	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan	Program pemenuhan UKP dan UKM (JKN)
		Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan (Pemerataan Nakes)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8	Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan nilai-nilai sosial budaya	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
		Program pengelolaan cagar budaya
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10	Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
11	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Program pengembangan perumahan
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum



		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		Pengelolaan persampahan
12	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dan clean governance serta terwujudnya pelayanan publik yang prima	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Program pengelolaan pendapatan Daerah Program informasi dan komunikasi publik Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

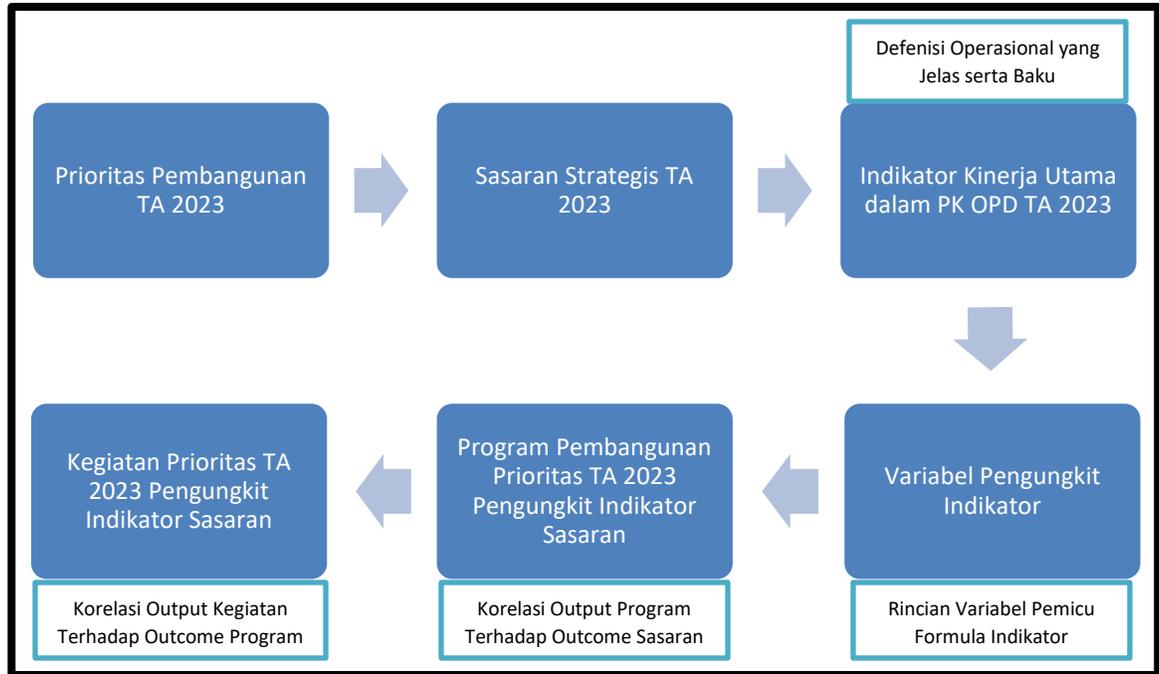
Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan dijadikan pedoman dalam pemilihan program pengungkit sasaran strategis yang telah ditetapkan daerah dan perangkat daerah agar pembangunan lebih terarah dan terkendali. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan menetapkan Sasaran Strategis Daerah dan Indikator kinerja yang akan diwujudkan selama tahun 2023. Proses tersebut nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah disertai target indikator kinerja yang akan dicapai. Setiap Perangkat Daerah harus memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 guna memaksimalkan capaian sasaran strategis yang dibebankan agar mampu mengungkit dan mendukung capaian strategis daerah untuk tahun 2023.

Dalam rangka menjamin penetapan prioritas pembangunan Tahun 2023 sejalan dengan cascading kinerja dari setiap perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan pola hubungan perencanaan kinerja sebagaimana tertuang pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1



**Pola Sinkronisasi Prioritas Pembangunan
dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**



Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten, yang seterusnya akan dijabarkan menjadi capaian kinerja dari setiap jenjang manajemen. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Bupati Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD.

D. Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama



5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

“LABUHANBATU SELATAN SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.

Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam



- Misi 3:** pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- Misi 4:** Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
- Misi 5:** Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
- Misi 6:** Menciptakan sinergi pembangunan dibidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

E. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung misi tersebut. Tujuan merupakan panjabaran/implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan yang



lebih terukur, objektif dan terinci. Oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini juga sekaligus menggambarkan tugas dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lima tahun kedepan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai, semua hak dan kewajiban yang dapat diukur atau dinilai serta segala sesuatu dengan hasil yang baik dan dikelola dengan baik dalam batas waktu 5 (lima) tahun serta bertanggung jawab kepada peraturan, efisien, efektif, transparan dengan memperlihatkan rasa keadilan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan visi dan misi di atas dikaitkan dengan kondisi saat ini, perubahan kebijakan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan maka



tujuan pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*) serta pelayanan publik yang prima.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan Pemukiman.
7. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dalam hal pencapaian tujuan dimaksud, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah:

SASARAN - Misi 1, Misi 2, dan Misi 4 – Tujuan 1 (Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman).

1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

SASARAN - Misi 1, Misi 2, dan Misi 4 – Tujuan 2 (Meningkatkan kualitas sumber daya manusia).

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

SASARAN - Misi 3 – Tujuan 1 (Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*) serta pelayanan publik yang prima).

1. Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan.
4. Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.



5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

SASARAN - Misi 5 – Tujuan 1 (Meningkatkan perekonomian masyarakat).

1. Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan.

2. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

SASARAN - Misi 5 – Tujuan 2 (Meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif).

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

2. Menurunnya tingkat kemiskinan

SASARAN - Misi 6 – Tujuan 1 (Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan Pemukiman).

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten.

2. Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan terpadu.

3. Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatnya kawasan pemukiman yang tidak kumuh.

SASARAN - Misi 6 – Tujuan 2 (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan).

1. Meningkatnya kualitas air.

2. Meningkatnya kualitas udara.

3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



F. Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023

Misi/ Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	
Misi 1: Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis								
Misi 2: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan								
Misi 4: Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan								
Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman								
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	50%	50%	55%	60%	100%
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia								
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	68,95	69,21	69,51	69,81	70,45
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,83	8,92	8,99	9,09	9,26
		Harapan lama Sekolah	Tahun	13,00	13,25	13,50	13,75	14,25
Misi 3: Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN								
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) serta terwujudnya pelayanan publik yang prima								
	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Tingkat maturitas SPIP	Indeks	3	3	3	3	4
	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas	Nilai Sakip	Predikat	C	CC	CC	B	BB



	Instansi Pemerintah							
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas Laporan	Predikament	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2	2,5	3	3,5	4,5
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	Persen	82,00	88,31	89,00	90,00	92,00
Misi 5 : Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata								
Meningkatkan perekonomian masyarakat								
	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	44,95	45,45	45,95	46,45	46,95
		Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	26,97	27,47	27,97	28,47	29,47
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	49,50	52,00	54,50	57,00	62,00
Meningkatnya perekonomian yang merata dan inklusif								
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,70	4,68	4,67	4,65	4,63
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	8,04	7,74	7,44	7,14	6,70
Misi 6: Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak								
Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan pemukiman								
	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	Persen	65,14	66,64	68,14	69,64	72,64
	Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman dan terpadu	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	80,00	80,50	81,00	81,50	82,50
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	49,23	49,73	50,23	50,73	51,73
	Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan	Persen	76,00	76,50	77,00	77,50	78,50



	perumahan serta meningkatnya kawasan pemukiman yang tidak kumuh							
		Persentase pemukiman yang tidak kumuh	Persen	70,50	71,00	71,50	72,00	73,00
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan								
	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Indeks	52,46	53,81	53,91	54,01	54,21
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Indeks	92,03	88,30	88,40	88,50	88,70
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	Indeks	22,75	33,29	36,16	39,03	44,77
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	60,01	60,16	60,58	60,60	60,65

Sumber: RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026

G. Rencana Kinerja

Sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, disusun suatu rencana kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, sedangkan tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023



serta Prioritas dan Plafon Anggaran, Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Bupati Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Rencana Kinerja tahun 2023 yang terdokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) Tahun 2023.

**Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja
-----------	--------------------------	--------------------------	------------------------



1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Pembangunan Puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Pembangunan/penyediaan sarana prasarana pendidikan
		Harapan lama Sekolah	
4	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Tingkat maturitas SPIP	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Monitoring dan Evaluasi



			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
5	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas Laporan	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah mulai dari penyusunan sampai pelaporan
7	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah



8	Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	Peningkatan Pelayanan Pencatatan sipil, Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan, Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil, Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
9	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
		Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (perikanan)



10	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan, Pelayanan Antarkerja, Perluasan Kesempatan Kerja
12	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Pendataan Fakir Miskin, engelolaan Data Fakir Miskin, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
13	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota, Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang



			Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
14	Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman dan terpadu	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan, Pelebaran Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Pengadaan Pemasangan Marka Jalan, Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
15	Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatnya kawasan pemukiman yang tidak kumuh	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan



		Persentase pemukiman yang tidak kumuh	Penyusunan dan /atau review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
16	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
17	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	
18	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati



19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
----	---	---	---

Sumber data : Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023 dan RKPd Tahun 2023

H. Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2023 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang di dokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*).

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023, antara lain:

No	Tujuan Perjanjian Kinerja
1	Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur



- 2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, hal ini sebagai indikator keberhasilan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023:

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

TUJUAN PEMBANGUNAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman	1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	55
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2	Usia harapan hidup	Indeks	69,51
		3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99
				4	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,50



3	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) serta pelayanan publik yang prima	4	Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih	5	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3
		5	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	6	Nilai SAKIP	Predikat	CC
		6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	7	Opini BPK atas laporan	Kategori	WTP
		7	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Indeks SPBE	Indeks	3
		8	Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	9	IKM Tingkat Kabupaten	%	89,00
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	9	Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor unggulan	10	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	45,95
				11	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	27,97
		10	Meningkatnya realisasi investasi daerah	12	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	%	54,50
5	Meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif	11	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,67
		12	Menurunnya tingkat kemiskinan	14	Persentase angka kemiskinan	%	7,44
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan Pemukiman	13	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	15	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	%	68,14
		14		16	Proporsi panjang jalan	%	81,00



				dalam kondisi baik			
		Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan terpadu	17	persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	%	50,23	
	15	Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatkannya kawasan pemukiman yang tidak kumuh	18	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan	%	77,00	
			19	Persentase pemukiman yang tidak kumuh	%	71,50	
7	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	16	Meningkatnya kualitas air	20	Indeks kualitas air	%	53,91
		17	Meningkatnya kualitas udara	21	Indeks kualitas udara	%	88,40
		18	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	22	Indeks tutupan lahan	%	36,16
		19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	23	Persentase jumlah sampah yang ditangani	%	60,58

I. Rencana Anggaran

Besaran anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja 2023 ditetapkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023



NO	URAIAN	ANGGARAN 2023
	Pendapatan Daerah :	
1.	a. Pendapatan Asli Daerah	69.612.910.536,00
	b. Pendapatan Transfer	917.713.650.022,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	00,00
	Belanja Daerah :	
2.	a. Belanja Operasi	768.711.328.071,00
	b. Belanja Modal	244.657.830.483,00
	c. Belanja Tak Terduga	9.145.201.199,00
	d. Transfer	121.935.911.323,00
	Pembiayaan :	
3.	Penerimaan Daerah	159.363.610.518,00
	Pengeluaran Daerah	2.239.900.000,00

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai cara untuk memberikan informasi, mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai alat pertanggungjawaban memiliki makna evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.



Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggung jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dan hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai alat ukur yang objektif. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka



mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

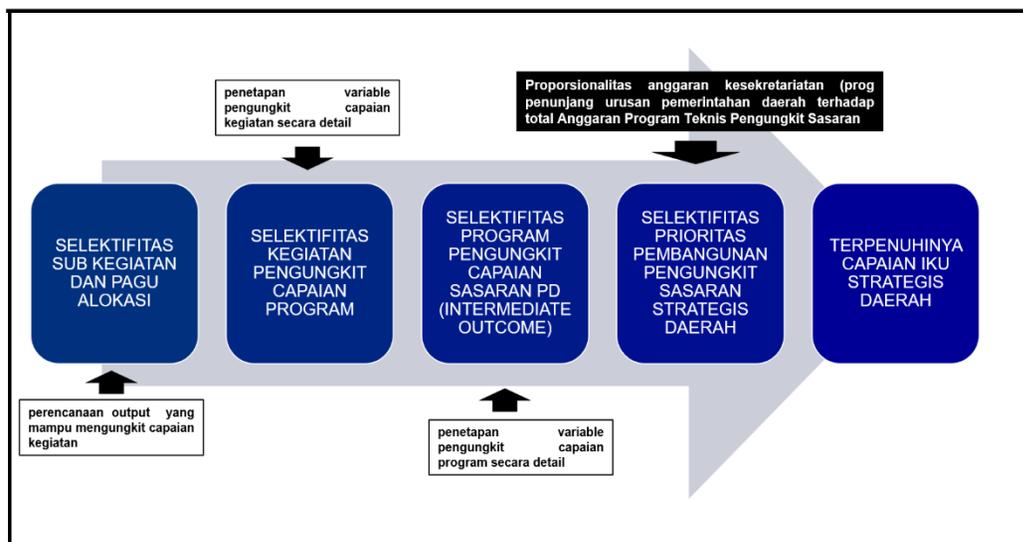
Pada Tahun 2023, dalam proses perjalanan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selain mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Labuhanbatu Selatan juga mencermati dan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam memastikan terpenuhinya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja agar didukung proses pemenuhan, kualitas dan daya implementasinya.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Daerah mewakili Sasaran Strategi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja. Pencapaian target sasaran strategis daerah sangat ditentukan adanya proses dukungan secara berjenjang dari Perangkat Daerah dan segenap jenjang manajemen Perangkat Daerah secara sistematis mempedomani cascading kinerja.

Kualitas Perencanaan Kinerja sebagaimana telah tertuang pada Bab II sebelumnya sangat dipengaruhi adanya implementasi pelaksanaan kegiatan dan program yang mengacu pada setiap sasaran strategis yang dituangkan dalam cascading kinerja perangkat daerah tahun 2023. Sebagai ilustrasi akuntabilitas kinerja yang terarah dan terkendali serta tepat sasaran pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerapkan pola hubungan kinerja strategis pada level perangkat daerah sebagaimana tertera dibawah ini :



**Gambar 3.1
Pola Hubungan Kinerja Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**



Hasil dan manfaat penerapan dan mekanisme pola sinkronisasi kinerja Tahun 2023 diatas, telah memberikan manfaat secara optimal kepada Pengelolaan APBD Tahun 2023, meskipun belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Beberapa hal positif yang telah dicapai selama tahun 2023 sebagai dampak dari penerapan pola hubungan kinerja tersebut antara lain :

No	Manfaat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
a.	Postur Anggaran Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah cenderung lebih ideal dalam mendukung kinerja program teknis (proses utama) pada perangkat daerah. Hal itu sejalan dengan Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan pada masing masing perangkat daerah
b.	Dengan penetapan selektifitas prioritas program utama/teknis pada setiap OPD yang memiliki daya ungkit capaian sasaran OPD, telah diperoleh hasil dari beberapa perangkat daerah telah mampu mencapai



	target indikator kinerja utama perangkat daerah sekaligus mendukung capaian sasaran strategis daerah.
c.	Dengan penetapan variabel variabel pemicu dan penguangkit setiap indikator program, telah membantu perangkat daerah dalam memilih dan memprioritaskan jenis kegiatan yang memiliki output penguangkit capaian program
d.	Dengan penetapan variabel-variabel pemicu dan penguangkit setiap indikator kinerja kegiatan, telah membantu perangkat daerah dalam memilih dan memprioritaskan jenis sub kegiatan yang memiliki output penguangkit capaian indikator kegiatan. Sekaligus menjaga keseimbangan postur rincian belanja pendukung sub kegiatan agar selaras dengan output yang ditargetkan agar menghindari pemborosan anggaran.

Selanjutnya dalam proses pengukuran kinerja, sebagaimana diatur dalam tata cara evaluasi kualitas pengukuran kinerja sesuai Permenpan 88 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepenuhnya telah menetapkan skala pengukuran capaian kinerja untuk memudahkan proses penilaian capaian pada tahun 2023 dibawah ini dituangkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	> 90 – 100	Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 – 80	Baik
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	>50 – 60	Agak Kurang
6.	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang



Dalam proses pengukuran kinerja tahun 2023, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menguraikan capaian kinerja dengan memuat aspek aspek sebagai berikut :

NO	ASPEK YANG AKAN DIURAIKAN
1	Sasaran Strategis
2	Indikator Kinerja Utama Terpilih
3	Definsi Operasional IKU terpilih
4	Faktor faktor penguangkit IKU
5	Capaian Indikator
6	Penyebab Ketidak tercapaian
7	Faktor Pendukung Keberhasilan
8	Upaya Peningkatan Capaian
9	Proses Umpan Balik Terhadap Kinerja 2024

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Mengukur Kinerja dalam satu periode ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dalam mengatasi masalah utama pembangunan pada periode itu sekaligus memberikan penilaian efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian tingkat kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *Reward* (penghargaan) dan *Punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang



digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi penting dalam proses mengukur sebuah keberhasilan dalam capaian strategis. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah juga merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ketiga perjalanan RPJMD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga digunakan untuk menilai pertumbuhan keberhasilan pelaksanaan seluruh program pembangunan untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Pengukuran Kinerja daerah juga wajib memberikan informasi terkait keberhasilan dalam mengurangi permasalahan pembangunan dan memperbaiki pelayanan publik. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari 19 sasaran dan 23 indikator kinerja.



Untuk mengetahui capaian kinerja daerah, Indikator Kinerja Utama membutuhkan formula dan definisi operasional yang jelas dan terukur. Formulasi Indikator Kinerja Utama daerah pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki jenis dan metode serta rumus sebagai berikut :

No	Type Pengukuran
1	Kualitatif dengan penggunaan skala
2	Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut
3	Persentase : proporsionalitas atas dua variabel
4	Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain
5	Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian
6	Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu

Mekanisme atau prosedur pengumpulan data kinerja yang dilakukan sebagaimana tabel di bawah ini merupakan prosedur baku yang dilakukan dalam pengumpulan dan penyediaan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar mampu menghasilkan dan menyajikan tingkat capaian indikator kinerja dari seluruh unit dalam mendukung penyelesaian laporan kinerja instansi pemerintah.

Data kinerja yang dikumpulkan dengan prosedur yang jelas dan terukur telah terlebih dahulu diverifikasi untuk menjamin validitas dan akurasi data kinerja serta relevan

Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.2
Mekanisme Perhitungan Data Kinerja
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah PERDA dan PERKADA yang ditegakkan}}{\text{Jumlah PERDA dan PERKADA Keseluruhan}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
				Harapan lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: HLSt_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) P = Jumlah Penduduk usia i pada tahun t FK = Faktor koreksi.</p>	PD Pengampu Urusan Pendidikan



3	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaraanya pemerintahan yang baik dan bersih	Tingkat maturitas SPIP	No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	PD Pengampu Urusan Pengawasan
					1	Belum ada	Kurang dari 1.0 (0<skor<1.0)	
					2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0≤skor≤2.0)	
					3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0≤skor≤3.0)	
					4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0≤skor≤4.0)	
					5	Terkelola dan Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0≤skor≤4.5)	
					6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5≤skor≤5.0)	
		Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai hasil Evaluasi dari KemenPAN-BR		PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n		PD Pengampu Urusan Keuangan		
		Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	$\frac{\text{Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik yang berbasis elektronik}}{\text{Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik}} \times 100\%$		PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika		



			Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan
4	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Perindustrian, BPS
			Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Pertanian dan Perikanan, BPS
			Meningkatnya realisasi investasi daerah	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	$\frac{\text{Nilai Investasi n} - \text{Nilai Investasi n - 1}}{\text{Nilai Investasi n}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan
5	Meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja, BPS
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	(100 – Angka Kemiskinan)	PD Pengampu urusan Sosial , BPS



6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan pemukiman	Indeks infrastruktur wilayah	Terwujudnya perencanaan , pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	(100 – Kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang)	PD Pengampu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan terpadu	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatkannya kawasan pemukiman yang tidak kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan	$\frac{\text{Jumlah sarana, prasarana dan utilitas perumahan yang dibangun}}{\text{Jumlah seluruh sarana, prasarana dan utilitas perumahan}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase pemukiman yang tidak kumuh	(100 – Persentase Permukiman yang kumuh)	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
7	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1)\right)$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup



		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh sampah}} \times 100\%$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

B. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA IKU 2023

Berdasarkan data dan informasi kinerja selama periode tahun 2023 mempedomani target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 serta menggunakan alat ukur terpilih, berikut ini disajikan secara umum capaian kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria/C ode	Program Prioritas Pengungkit Sasaran	Dinas Penanggung Jawab (Crosscutting IKU)
			Target	Capaian	% Capaian			

**PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



1	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA Dan PERKADA Yang Ditegakkan	55%	55%	100%	Memuaskan	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,51	69,54	100%	Memuaskan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Program Pengendalian Penduduk	DPPPAPP KB
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah	8,99 Tahun	8,93 Tahun	99%	Memuaskan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Harapan Lama Sekolah	13,5 Tahun	13,42 Tahun	99%	Memuaskan		
4	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,67%	Cukup Baik	Program Penyelenggara	Inspektorat

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



							raan Pengawasan	
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
5	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	CC	C	50%	Kurang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah
							Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappedalitbang
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Memuaskan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
7	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3	1,94	64,67%	Cukup Baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
8	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Kepada Masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	89%	88,62 %	99,57%	Memuaskan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
							Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
							Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP



9	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1 Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	45,95 %	41,84 %	91,06%	Memuaskan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskopukm Serta Perdagangan
		2 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	27,97 %	30,81 %	110,15%	Memuaskan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
10	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	54,50 %	40,38 %	74,09%	Baik	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Pelayanan Penanaman Modal	
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha Bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,67 %	3,43 %	73,45%	Baik	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
12	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	7,44 %	8,06 %	92,31%	Memuaskan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
13	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Yang Konsisten	Persentase Kesesuaian Pertimbangan Teknis Tata Ruang	68,14 %	68,52 %	100,55%	Memuaskan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR

**PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



14	Tersedianya Infrastruktur Yang Aman, Nyaman, Dan Terpadu	1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	81,00 %	98,21 %	121,25%	Memuaskan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
		2 Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	50,23 %	25,61 %	50,99%	Agak Kurang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
15	Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Meningkatkan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Kumuh	1 Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan	77,00 %	68%	88,31%	Sangat Baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Disperukim
		2 Persentase Pemukiman Yang Tidak Kumuh	71,50 %	87%	121,68%	Memuaskan	Program Pengembangan Perumahan	Disperukim
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperukim
16	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	53,91 %	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH dan Perikanan
17	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88,40 %	93,3 %	105,54%	Memuaskan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH dan Perikanan



18	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan	36,16 %	29,05 %	80,34%	Sangat Baik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH dan Perikanan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Hijau Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Persentase Jumlah Sampah Yang Ditangani	60,58 %	11,21 %	18,50%	Sangat Kurang	Program Pengelolaan Persampahan	DLH dan Perikanan

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa dalam proses evaluasi terhadap capaian kinerja sekurang-kurangnya memuat hal hal sebagai berikut :

1. Menyajikan capaian tahun berkenaan.
2. Perbandingan capaian tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan capaian tahun pelaporan dengan tahun-tahun dalam periode RPJMD yang telah dilalui.
4. Analisis faktor-faktor pendukung keberhasilan.
5. Analisa faktor penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan.
6. Upaya perbaikan dan peningkatan yang perlu dilakukan.
7. Umpan balik perbaikan dalam perencanaan kinerja tahun 2024.
8. Perangkat daerah penanggungjawab IKU Daerah dan program prioritas pengungkit IKU serta angka efisiensi yang dicapai.



Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, berdasarkan pengukuran kinerja dan IKU sebagai acuan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 19 sasaran dan 23 indikator kinerja daerah dari 6 Misi dan 7 Tujuan.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 01

Sasaran Strategis	: Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Indikator Kinerja Utama	: Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan.
Definisi Operasional IKU	: Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan adalah Persentase Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibandingkan dengan Jumlah



- keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dalam bentuk persentase.
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penegakan PERDA dan PERKADA.
- Tipe Pengukuran : Persentase
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) :
 - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Langsung) : Satuan Polisi Pamong Praja

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode RPJMD sampai dengan tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Capaian Kinerja Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	persen	55%	55%	Memuaskan	50%
Capaian Kinerja Sasaran 1				100	

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja	:	Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 telah memenuhi target, dan ini memberikan informasi adanya
-----------------	---	--



	<p>upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan.</p> <p>Capaian tahun 2023 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini tentu menjadi capaian yang harus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.</p>
<p>Faktor Pendukung Keberhasilan :</p>	<p>Capaian persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan tahun 2023 merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas dan Pihak penyelenggara melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat. • Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global. • Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. • Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi di lapangan. • Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadaai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional. • Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.



	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan etos kerja serta motivasi yang tinggi dari aparatur. • Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.
Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja	<p>: Meskipun capaian tahun 2023 telah memenuhi target, namun masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada tahun 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur. • Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. • Meningkatkan tata kelola manajemen. • Memenuhi kebutuhan minimal operasional penyelenggaraan pemerintahan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
Umpan Balik Tahun 2024	<p>: Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)</p>
Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU	<p>: Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada kedua program diatas mencapai Rp 6.508.854.744,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 6.150.903.311,00 atau 94,50% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.</p>

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 02

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 Indikator Kinerja Utama : Usia harapan hidup



Definisi Operasional IKU	:	Alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam membantu mewujudkan lama harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memfasilitasi layanan kesehatan berkualitas dalam rangka mendorong usia harapan hidup yang lebih baik dari penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tipe Pengukuran	:	Angka Absolut
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	<ul style="list-style-type: none">• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan• Program Pengendalian Penduduk
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	Daerah jawab	Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang menggunakan data hasil pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Perangkat Daerah, yaitu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada



hususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mulai dari kandungan sampai lanjut usia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan mulai dari kandungan sampai lanjut usia tentunya akan mempengaruhi keberhasilan Umur Harapan Hidup. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga membentuk dan memberdayakan Posyandu Lanjut Usia di masyarakat.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023 dan Periode
RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2021	Realisasi 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian		



Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	69,54	Memuaskan	68,81	69,16
Capaian Kinerja Sasaran 2				100%		

Sumber data : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, BPS, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.5 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 namun masih berada dibawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kabupaten. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya pertumbuhan yang positif namun perlu didukung upaya yang lebih baik dalam peningkatan kualitas capaian program pengungkit serta alokasi anggaran dan langkah perbaikan lainnya. Dan capaian tersebut apabila ditinjau dari periode RPJMD, maka sejak tahun 2021 hingga 2023, telah terjadi pertumbuhan peningkatan usia harapan hidup.

Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target :

- Beberapa target indikator kualitas kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, belum dapat tercapai. Beberapa target indikator kualitas kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, belum dapat tercapai. Hal ini terutama disebabkan oleh masih kurangnya tenaga kesehatan memenuhi standar kompetensi serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka pemberantasan penyakit serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan air bersih
- Kurangnya tenaga petugas penyuluh kesehatan lingkungan yang masih jauh dari kebutuhan serta kurangnya tenaga analis



kimia yang bekerja di laboratorium Puskesmas/Pustu dalam menunjang penegakan diagnosa dokter

- Kurangnya sumberdaya aparatur untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah
- Kurangnya jumlah Alat Kesehatan yang sesuai dengan standar di Rumah Sakit Umum Daerah

Upaya Perbaikan peningkatan Kinerja

dan : Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan fokus untuk terus meningkatkan capaian atas Peningkatan Usia Harapan Hidup melalui :

- Meningkatkan disiplin SDM aparatur dan kualitas layanan kesehatan secara terpadu, baik mutu obat-obatan, alat-alat kesehatan umum, gigi, laboratorium dan reagensianya sebagai penunjang pemeriksaan pengobatan di seluruh puskesmas
- Penambahan sumber daya aparatur dan tenaga kesehatan untuk menunjang kegiatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan, serta perlunya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap.
- Mengintegrasikan pembangunan kesehatan lingkungan dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesehatan dan mutu hidup masyarakat, termasuk meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan serta pola hidup bersih dan sehat.
- Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemandirian dan membentuk



perilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.

- Penambahan sumber daya aparatur untuk menunjang kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Kelas RSUD
- Mengusulkan Pemenuhan Alat Kesehatan sesuai dengan Standar dan Kelas Rumah Sakit.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Usia Harapan Hidup (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 4 (empat) program prioritas pengungkit capaian kualitas Laporan Keuangan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada ketiga program diatas mencapai Rp 58.052.159.041,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 32.689.197.634,00 atau 56,31% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 03

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Indikator Kinerja Utama	: Rata-rata lama sekolah
Definisi Operasional IKU	: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan rata rata lama sekolah bagi penduduk berusia diatas 15 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan



Tipe Pengukuran : Rata-rata
 Beberapa Program Prioritas : Program Pengelolaan Pendidikan
 Pengungkit IKU (pengungkit langsung)
 Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan
 Penanggung jawab :
 (Langsung)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023:

**Tabel 3.7
Capaian Kinerja Rata Rata Lama Sekolah
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Rata Rata Lama Sekolah	Rata rata	8,99	8,93	Memuaskan	8,92
Capaian Kinerja Sasaran 3				99	

Sumber data : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, BPS, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.7 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kabupaten. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah untuk memberikan dan mempermudah pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Meskipun kenaikan tersebut tidak signifikan karena belum menggambarkan rata rata lama sekolah melebihi 9 (sembilan) tahun namun terlihat adanya upaya untuk terus meningkatkan kinerja dimaksud. Dan capaian



- tersebut apabila ditinjau dari periode RPJMD, maka sejak tahun 2022 hingga 2023, telah terjadi pertumbuhan peningkatan rata rata sekolah.
- Faktor Keberhasilan Pendukung : Peningkatan capaian kualitas rata rata lama sekolah tahun 2023 merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dukungan pihak pihak terkait melalui:
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan
 - dukungan pemerintah untuk memberikan dan mempermudah pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- Faktor Keberhasilan Pendukung : Peningkatan capaian kualitas rata-rata lama sekolah tahun 2023 merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dukungan pihak-pihak terkait melalui:
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan.
 - Memaksimalkan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah terutama pendidikan dasar
- Upaya Perbaikan peningkatan Kinerja dan : Meskipun capaian tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, namun masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada tahun 2023 antara lain :
- Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan khususnya di daerah terpencil dan susah dijangkau
 - Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan
 - Memaksimalkan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah terutama pendidikan dasar.
 - Melaksanakan program/kegiatan pada APBD yang sudah ditetapkan secara maksimal sehingga penyerapannya dapat dilakukan secara optimal



- Peningkatan mutu pendidikan akan dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan manajemen pendidikan yang merata dan berkualitas
- Mengoptimalkan tenaga pengajar yang ada sebagai tenaga administrasi serta melakukan sosialisai dan bimbingan teknis pengelolaan administrasi sekolah dan penyusunan pelaporan keuangan sekolah pada satuan pendidikan negeri.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Rata-rata Lama Sekolah. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian rata-rata lama sekolah diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 110.388.505.066,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 54.619.092.773,00 atau 49,48% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 04

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Indikator Kinerja Utama	: Harapan Lama Sekolah
Definisi Operasional IKU	: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan angka harapan lama sekolah bagi anak pada level umur tertentu dalam mendapatkan proses pendidikan formal dari Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimasa mendatang
Tipe Pengukuran	: Angka absolut



Beberapa Program Prioritas : Program Pengelolaan Pendidikan
Pengungkit IKU (pengungkit langsung)

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan
Penanggung jawab
(Langsung)

Indikator Kinerja *Harapan Lama Sekolah* hal ini didapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana data yang digunakan data tahun 2023, *Harapan Lama Sekolah* merupakan salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan.

Harapan Lama Sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. *Harapan lama sekolah* menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga(2021-2026) sebagai berikut :

Tabel 3.8

**Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Harapan Lama Sekolah	skala	13,5	13,42	Memuaskan	13,12
Capaian Kinerja Sasaran 4				99	

Sumber data : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, BPS, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.9 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah untuk memberikan dan mempermudah pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Kenaikan tersebut sudah signifikan karena sudah menggambarkan harapan lama sekolah hampir melebihi 13,5 (tiga belas koma lima) tahun namun terlihat adanya upaya untuk terus meningkatkan kinerja dimaksud. Dan capaian tersebut apabila ditinjau dari periode RPJMD, maka sejak tahun 2022 hingga 2023, telah terjadi pertumbuhan peningkatan rata rata sekolah.
- Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target : • Rendahnya motivasi sebagian masyarakat untuk meningkatkan pendidikan kepada putra-putrinya.
 • Lingkungan yang memberikan pengaruh buruk terhadap Pendidikan.
 • Belum maksimalnya ketersediaan sarana pendidikan untuk perguruan tinggi.
 • Ekonomi sebagian masyarakat yang masih rendah.
 • Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Guru) masih belum maksimal
- Upaya Perbaikan peningkatan Kinerja dan : Meskipun capaian tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, namun masih perlu



mendapat perhatian dan perbaikan pada tahun 2024 antara lain :

- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat penting pendidikan
- Perlu peningkatan edukasi di lingkungan sekolah tentang pentingnya pendidikan tinggi.
- Membuat usulan kepada Pemerintah Daerah untuk penyediaan perguruan tinggi.
- Pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.
- Peningkatan sarana prasarana Pendidikan

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Harapan Lama Sekolah. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian kualitas harapan lama sekolah diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 110.388.505.066,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 54.619.092.773,00 atau 49,48% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 05

Sasaran Strategis	: Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih
Indikator Kinerja Utama	: Tingkat maturitas SPIP
Definisi Operasional IKU	: Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tipe Pengukuran	: Level



Beberapa Program Prioritas : • Program Penyelenggaraan Pengawasan
 Pengungkit IKU (pengungkit langsung) • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Perangkat Daerah : Inspektorat
 Penanggung jawab :
 (Langsung)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	Level 2	Cukup Baik	Level 2
Capaian Kinerja Sasaran 5				100	

Sumber : Laporan Kinerja 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, 2023

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.11 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 tidak mengalami perubahan dengan tahun 2022 dan tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kabupaten. Tidak tercapainya targer tersebut memberikan informasi hal yang harus dibenahi serta perlu didukung upaya yang lebih baik dalam peningkatan kualitas capaian program pengungkit serta alokasi anggaran dan langkah perbaikan lainnya.

Faktor Pendukung : Capaian Tingkat Maturitas SPIP 2023
 Keberhasilan : merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus



- dilakukan oleh Inspektorat dan dukungan pihak-pihak terkait melalui:
- Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP
 - Komitmen perangkat daerah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Capaian tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dalam beberapa aspek serta perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada tahun 2024 antara lain :
- Meningkatkan kuantitas serta kualitas sumber daya aparatur di Inspektorat Daerah khususnya auditor.
 - mensosialisasikan SPIP untuk diterapkan dalam mendukung tujuan organisasi meraih capaian kinerja sesuai target.
 - meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan
 - Mengotimalkan peran dan kapabilitas inspektorat kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai apip daerah agar mampu memberikan saran strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Menyusun daftar risiko dan menggunakan hasil analisis atas risiko teridentifikasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing OPD.
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Tingkat Maturitas SPIP. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program dan Pengungkit IKU : • Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian angka harapan hidup diketahui bahwa total alokasi anggaran pada kedua program diatas mencapai Rp



1.393.048.311,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 1.166.142.371,00 atau 83,71% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 06		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai SAKIP
Definisi Operasional IKU	:	Parameter yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan proses akuntabilitas keuangan dan program dalam satu periode.
Tujuan Penggunaan IKU	:	Nilai hasil perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan.
Tipe Pengukuran	:	Indeks
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Perangkat Penanggung (Langsung)	Daerah jawab	Sekretariat Daerah Bappedalitbang Perangkat Daerah Lainnya

Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi



pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2023 masih menunjukkan beberapa kelemahan mendasar yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah berupaya untuk merumuskan perencanaan kinerja yang berkualitas dan dipatuhi dalam proses pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya telah dilakukan upaya untuk memahami dan memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaporan kinerja serta cara melakukan analisa dan evaluasi kinerja dibawah koordinasi dan pembinaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selama proses perjalanan akuntabilitas tahun 2023, beberapa langkah fundamental telah dilakukan guna memperbaiki hasil dan kualitas kinerja pemerintah daerah antara lain :

No	Aspek	Upaya Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait kualitas rencana strategis, perumusan indikator dan mekanisme pengumpulan data kinerja• Memandu penyusunan rencana aksi dan rencana kinerja tahunan kepada perangkat daerah yang selaras dengan faktor pengungkit capaian indikator kinerja• Merumuskan dan membina penyusunan cascading kinerja yang sinkron terhadap peta proses bisnis dan pohon kinerja perangkat daerah• Melakukan reviu atas kelayakan indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja program dan kegiatan yang selaras dan memiliki daya ungkit
2	Pengukuran Kinerja	a. Menyempurnakan indikator kinerja melalui penjabarann definisi operasional



		<p>indikator, merumuskan faktor faktor penguangkit indikator</p> <p>b. Menyiapkan dan mensosialisasikan tata cara pengelolaan data kinerja menggunakan google drive</p> <p>c. Membantu melakukan kajian atas metode penetapan alokasi anggaran yang berorientasi pada selektifitas sub kegiatan yang bersifat sebagai penguangkit capaian indikator kinerja sasaran secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>d. Mensosialisasikan komitmen dan budaya kerja yang mendukung capaian kinerja perangkat daerah</p>
3	Pelaporan Kinerja	<p>a. Membimbing proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah mempedomani Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara RB Tahun 2021 dan regulasi terkait lainnya</p> <p>b. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung laporan kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi standar Permenpan RB No 88 Tahun 2021</p>
4	Evaluasi akuntabilitas internal	<p>a. Melakukan pelatihan terhadap para auditor yang akan menjadi evaluator</p> <p>b. Melakukan forum Group Discussion (FGD) penyamaan persepsi Tata Cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>c. Melakukan evaluasi bertahap dalam proses kepatuhan terhadap Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021</p>

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.13
Capaian Kinerja Nilai SAKIP
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Satuan	Tahun 2023		
--------	------------	--	--



Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Capaian 2022	Capaian 2021
Nilai	Predikat	CC	C	Kurang	C	C
Capaian Kinerja Sasaran 1				Kurang		

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai C sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk diadakan perbaikan di tahun mendatang.

Faktor Pendukung Keberhasilan :
 • Perangkat Daerah diberikan pendampingan dalam pembuatan Cascading, Pohon Kinerja ,Crosscutting, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja.
 • Telah dilakukan Sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang proses penyusunan LKIP.
 • Telah menindaklanjuti hasil Laporan LKIP Tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Meskipun capaian tahun 2023 belum mencapai targer, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan fokus untuk terus meningkatkan capaian atas Nilai SAKIP melalui :

- Menindaklanjuti dan memperbaiki penyebab gangguan kualitas pada setiap komponen sebagai.



- Memperbaiki proses akuntabilitas komprehensif sejak perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan serta evaluasi internal pada Perangkat Daerah.
- Meningkatkan peran Inspektorat selaku pelaksana reuiu.
- Meningkatkan kualitas Fungsional Perencana SKPD dalam proses akuntabilitas kinerja tahun 2023 melalui pelatihan cascading kinerja, pohon kinerja, penyusunan rencana aksi dan rencana kinerja dll.

Umpan Balik Tahun :
2024

Kajian efisiensi Program :
Pengungkit IKU

- Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Nilai SAKIP. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program :
Pengungkit IKU

Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian Peningkatan Nilai SAKIP diketahui bahwa total alokasi anggaran pada kedua program diatas mencapai Rp 5.581.276.601,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 4.226.722.749,00 atau 75,73 % dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 07

Sasaran Strategis	: Meningkatkan akuntabilitas keuangan.
Indikator Kinerja Utama	: Opini BPK atas laporan Keuangan.
Definisi Operasional IKU	: Parameter yang berfungsi mengukur kepatuhan atas layak saji Laporan Keuangan untuk satu periode tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan



- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyajikan seluruh Unsur Laporan Keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan pada satu periode tertentu.
- Tipe Pengukuran : Kualitatif berdasarkan parameter/skala
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Perangkat Daerah Penanggung jawab (Langsung) : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.15
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP
Capaian Kinerja Sasaran 2						

Sumber data : BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara mendapatkan predikat WTP. Hal ini



- diharapkan dapat terus bertahan dan/atau meningkat di tahun-tahun berikutnya..
- Faktor Pendukung Keberhasilan :
- Penyempurnaan Regulasi tentang Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Meningkatkan kapasitas Aparatur Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah dengan Aplikasi Berbasis WEB;
 - Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI); dan
 - Koordinasi dan kerja sama antara Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan SKPD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta Pengembangan dengan stakeholder terkait.
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja :
- Meskipun capaian tahun 2023 sudah baik, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap harus fokus untuk terus meningkatkan capaian atas opini LKPD melalui :
- Menindaklanjuti dan memperbaiki kemungkinan penyebab gangguan layak saji terutama dalam beberapa pos neraca.
 - Mencegah terdapatnya unsur kerugian negara dan potensi kerugian negara yang memicu terganggunya capaian opini WTP
 - Meningkatkan peran Inspektorat selaku pelaksana reviu
 - Meningkatkan kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam pelaksanaan pelaporan keuangan dan akuntansi.
- Umpan Balik Tahun 2024 :
- Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan kualitas



laporan keuangan Perangkat Daerah dan Pemda. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program : Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit
 Pengungkit IKU : Laporan Keuangan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada kedua program diatas mencapai Rp 134.513.669.990,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 63.454.641.328,64 atau 47,17% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 08

Sasaran Strategis	: Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
Indikator Kinerja Utama	: Indeks SPBE
Definisi Operasional IKU	: nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur Kemampuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengelola Pemerintahan berbasis elektronik dalam satu periode tertentu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tipe Pengukuran	: Indeks
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	: Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun



2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indeks SPBE
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Indeks SPBE	Indeks	3	1.94	64,67%	Tidak Tersedia
Capaian Kinerja Sasaran 1				Cukup	

Sumber data : Kepmen PAN-RB Nomor 108 Tahun 2023

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.17 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 berada pada kriteria kurang karena hanya mencapai angka 64,67%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum adanya Kebijakan/Peraturan tentang Statistik Sektoral di Pemkab Labusel sehingga akan dilakukan perbaikan pada tahun mendatang.

Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target : 1. Belum adanya Kebijakan/Peraturan tentang Statistik Sektoral di Pemkab Labusel
2. Belum adanya kebijakan tentang SDI (Satu Data Indonesia)
3. Belum adanya Portal Data yang berisikan data dari seluruh kegiatan statistik di Pemkab Labusel

Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Guna meningkatkan Indeks SPBE, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan upaya- upaya peningkatan di tahun 2024 antara lain :

- Pembuatan portal data yang berisikan data dari seluruh kegiatan statistik di Pemkab Labusel



- Menyusun rencana Kebijakan/Peraturan tentang Statistik Sektoral di Pemkab Labusel
 - Menyusun rencana kebijakan tentang SDI (Satu Data Indonesia)
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Indeks SPBE. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian Indeks SPBE diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 1.248.704.368,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 1.245.304.000,00 atau 99,73% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 09

- Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
- Indikator Kinerja Utama : IKM Tingkat Kabupaten
- Definisi Operasional IKU : IKM Tingkat Kabupaten adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur Kepuasan Masyarakat/Penerima Manfaat Layanan dalam beberapa aspek pada periode tertentu
- Tipe Pengukuran : Indeks
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) :
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pelayanan Penanaman Modal



Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Penanggung jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 (Langsung) DPMPPTSP

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.19
Capaian Kinerja IKM Tingkat Kabupaten
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
IKM Tingkat Kabupaten	% (cakupan)	88,31	86,75	Memuaskan	83,61
Capaian Kinerja Sasaran 1				98,23%	

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.19 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 sudah mendekati target yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Target tidak Tercapai :

- Belum semua OPD khususnya yang berfokus pada pelayanan public memiliki Standar Pelayanan (SP)
- Masih adanya pelanggaran disiplin oleh PNS
- Belum ada monitoring penerapan SOP
- Belum optimalnya pengelolaan informasi public
- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
- Cakupan pelayanan administrasi kependudukan belum menyeluruh
- Keterlibatan publik dalam musrenbang yang



masih perlu ditingkatkan

- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Guna kinerja dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas terkait tetap merencanakan upaya-upaya peningkatan di tahun 2023 antara lain :
- Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan system informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas
 - Meningkatkan keterlibatan Publik dalam Musrenbang
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : • Bahwa dari 3 (tiga) program prioritas pengungkit capaian Indeks Kepuasan Masyarakat diketahui bahwa total alokasi anggaran pada ketiga program diatas mencapai Rp 1.515.170.867,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 1.485.584.724,00 atau 98,05% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 10

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kontribusi PDRB Sektor unggulan
Indikator Kinerja Utama	: Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan
Definisi Operasional IKU	: Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor industri pengolahan di daerah tersebut.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sector industry pengolahan yang mendatangkann



pendapatan bagi daerah dan menumbuhkembangkan perekonomian daerah.

Tipe Pengukuran : Pesentase

Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perangkat Daerah Penanggung jawab (Langsung) : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.20
Capaian Kinerja Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persentase	45,95%	41,84%	Memuaskan	43,35%	42,75%
Capaian Kinerja Sasaran 09				91,06%		

Sumber data : Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.20 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2022, juga belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target : • Kebutuhan modal usaha bagi pelaku industri pengolahan.



- Kualitas SDM pada sektor industri pengolahan masih belum seperti yang diharapkan.
 - Harga bahan baku dan energi secara global sedang dalam tren meningkat. Akibatnya, biaya produksi industri akan meningkat ke depannya.
 - Terbatasnya promosi dan pemasaran.
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Guna meningkatkan kinerja dalam Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan perdagangan tetap merencanakan upaya-upaya peningkatan di tahun 2023 antara lain :
- memberikan kemudahan kepengurusan usaha
 - kemudahan dalam proses kepengurusan pinjaman modal usaha
 - peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor industri pengolahan
 - Implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
 - Pendataan Secara Menyeluruh kedalam Sistem Informasi.
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Meskipun capaian Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan mengalami penurunan, bahwa dari dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp. 239.320.000,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp. 203.189.054,00 atau 84,90 % dan



hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 11

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor unggulan
Indikator Kinerja Utama	:	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Definisi Operasional IKU	:	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam satu periode tertentu.
Tipe Pengukuran	:	Persentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perizinan Usaha Pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	Daerah : jawab	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DLH dan Perikanan

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.21
Capaian Kinerja Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	



Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	27,97%	30,81%	Memuaskan	29,57
Capaian Kinerja Sasaran 10				110,15	

Sumber data : Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.21 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berhasil meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan secara signifikan. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah yang sudah maksimal untuk terus menerus dalam perbaikan dan meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan .
- Faktor Pendukung Keberhasilan : Peningkatan capaian Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2023 merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai penanggungjawab kinerja langsung serta dukungan dari pihak terkait lainnya melalui :
- Perkembangan yang signifikan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Labuhanbatu Selatan.
 - Meningkatnya kapabilitas sumber daya di setor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Labuhanbatu Selatan.
 - Dukungan Dinas terkait terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jiwa wirausaha petani untuk mencapai hasil produksi dan kesejahteraan petani.



- Memperluas lahan pertanian dan memperbaiki struktur tanah yang subur sesuai dengan syarat tumbuh.
- Menanam sesuai dengan agroklimatologi wilayah.
- Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan
- Dayadukung pupuk dan pestisida yang sesuai dan tepat.
- Kebijakan pemerintah dibidang pertanian dengan cara memberi bantuan pengadaan benih, alat mesin pertanian, pestisida dsb.

Upaya Mempertahankan dan peningkatan Kinerja : Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mendorong Peningkatan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas DLH dan Perikanan tetap merencanakan upaya-upaya peningkatan di tahun 2024 antara lain :

- Sektor Perikanan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pengembangan budidaya ikan air tawar maupun budidaya tambak (air payau).
- Mengupayakan Intensifikasi dan diversifikasi di bidang Pertanian.
- Pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan
- Mengadakan pelatihan yang berkelanjutan terhadap pengetahuan penyuluh pertanian untuk membimbing dan membina petani.

Umpan Balik Tahun 2023 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)



Kajian efisiensi Program : Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit Pengungkit IKU : Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian peningkatan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada kedua program diatas mencapai Rp. 469.904.260,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp. 375.239.000,00 atau 79,85% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 12

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya realisasi investasi daerah.
Indikator Kinerja Utama	:	Pertumbuhan realisasi investasi daerah.
Definisi Operasional IKU	:	Pertumbuhan realisasi investasi daerah adalah perbandingan nilai investasi tahun berjalan dikurangkan dengan nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun berjalan.
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Mendorong masuk nya investasi ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu periode tertentu,
Tipe Pengukuran	:	Persentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.22
Capaian Kinerja Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah
Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persentase	54,5%	40,38%	Baik	32,44%
Capaian Kinerja Sasaran 10				74,09	

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Labuhanbatu Selatan

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.22 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 belum memenuhi target tahun yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berhasil meningkatkan angka pertumbuhan penanaman modal dan ivestasi ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah yang belum maksimal untuk terus menerus dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan permodalan bagi pelaku usaha dan investor .

Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target :

- Perlu dikembangkan penataan objek investasi sebagai suatu kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan
- Potensi objek investasi yang ada belum tertata, dibangun dan dikembangkan secara profesional melalui sistem perencanaan yang terpadu
- Belum optimalnya koordinasi antara stakeholder terkait data dan dan informasi penanaman modal

Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mendorong pertumbuhan angka investasi secara terukur dan terkendali, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap merencanakan upaya-upaya peningkatan di tahun 2024 antara lain :



- Perlunya dilakukan database yang up to date terkait potensi dan unggulan daerah yang mudah diakses dan dikemas dalam bentuk teknologi informatika.
- Perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman modal serta meningkatkan promosi potensi daerah pada event-event regional, nasional atau internasional

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Pertumbuhan realisasi investasi daerah (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Meskipun capaian Pertumbuhan realisasi investasi daerah mengalami penurunan, bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian angka Pertumbuhan realisasi investasi daerah diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp. 529.748.774,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp. 322.662.298,00 atau 60,91 % dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 13

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Definisi Operasional IKU	: Alat ukur untuk mendeskripsikan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada periode tertentu.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam satu periode tertentu.
Tipe Pengukuran	: Cakupan /persentase



Beberapa Program Prioritas : • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) Tenaga Kerja
• Program Penempatan Tenaga Kerja

Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan
Penanggung jawab :
(Langsung)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.23
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Cakupan (%)	4,67 %	3,15%	Memuaskan	4,71	3,15
Capaian Kinerja Sasaran 12				100,00		

Sumber data: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.23 diatas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja tahun 2023 stabil sejak tahun 2022 yaitu tetap di angka 3,15%. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara serius dalam menciptakan kesempatan kerja baru, mendorong peningkatan keterampilan dan koordinasi dengan para pelaku usaha dan stake holders. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode RPJMD juga mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023 dan hal tersebut menjadi keberhasilan tersendiri dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



- Faktor Pendukung Keberhasilan : Peningkatan capaian-capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Pihak terkait lainnya melalui :
- perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha
 - Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Pemerintah dengan perusahaan dan tenaga kerja dalam tripartit, sehingga tidak banyak terjadi demonstrasi pekerja serta PHK, dan tercipta iklim yang kondusif dalam usaha.
 - Perbandingan jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja semakin sedikit dibanding penduduk angkatan kerja
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Capaian kinerja tahun 2023 yang telah dicapai perlu diupayakan peningkatan pada tahun 2024. Dinas penanggungjawab kinerja secara terarah mengupayakan langkah langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja 2024 melalui :
- Memberikan Pelayanan lebih maksimal tentang Informasi Pasar Kerja.
 - Melakukan koordinasi secara intens dan berkelanjutan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota.
 - Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) secara intens.
 - Membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah – sekolah Kejuruan.
 - Memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung peningkatan jumlah lapangan kerja.
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penurunan Tingkat



Pengangguran Terbuka (TPT). (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 2.207.771.725,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp. 2.167.921.362,00 atau 98,19% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 14

Sasaran Strategis	: Menurunnya tingkat kemiskinan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase angka kemiskinan
Definisi Operasional IKU	: Prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.
Tujuan Penggunaan IKU	: Mengukur keberhasilan pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan dalam satu periode tertentu melalui upaya perbaikan setiap komponen pemicu diantaranya kenaikan pendapatan perkapita dan membatasi pengeluaran perkapita serta mengendalikan variabel garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Tipe Pengukuran	: Cakupan /prosentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	: Dinas Sosial

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun



2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.25
Capaian Kinerja Persentase Angka Kemiskinan
Tahun 2023 dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Persentase angka kemiskinan	% (cakupan)	7,44	8,06	Memuaskan	8,53	8,09
Capaian Kinerja Sasaran 1				92,31		

Sumber data : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, BPS, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.25 diatas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan mengendalikan semua faktor faktor pemicu pengeluaran perkapita yang meningkat.

Perkembangan selama periode RPJMD pada capaian kinerja Angka Tingkat Kemiskinan juga mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2020 hingga 2023.

Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target :

- Rendahnya pendapatan penduduk yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan keterampilan.
- Minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- Faktor ekonomi yang merupakan penyumbang terbesar dalam menimbulkan masalah sosial di lingkungan masyarakat yang menyebabkan



meningkatnya masyarakat miskin, meningkatnya kawasan kumuh, meningkatnya kriminalitas dan meningkatnya gelandangan, pengemis dan lain-lain.

- Belum adanya pendampingan yang intensif kepada kelompok miskin atas usaha yang sejenis.
- Belum maksimalnya kemitraan antara kelompok miskin dan pelaku usaha yang lebih besar.

Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Guna meningkatkan kinerja dalam menurunkan persentase angka kemiskinan secara terukur dan terkendali, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Sosial tetap merencanakan upaya-upaya peningkatan di tahun 2024 antara lain :

- Melakukan Perhitungan anggaran secara detail pada program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Memaksimalkan program pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rumah Tidak Layak Huni.
- kebijakan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana; peningkatan pendapatan masyarakat miskin; pemugaran rumah tidak layak huni.
- Memaksimalkan fungsi aparatur pemerintahan.
- Memaksimalkan program pemerintah daerah meliputi kegiatan pelatihan anak terlantar, anak cacat dan masyarakat miskin dan kurang mampu
- Memaksimalkan peranan lembaga sosial seperti LK3, LKS dan PSM.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan capaian Persentase Angka Kemiskinan (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian Persentase Angka Kemiskinan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 5.652.058.167,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 4.045.126.250,00 atau 71,57 %



dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 15

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang
Definisi Operasional IKU	:	Alat ukur untuk mendeskripsikan persentase pertimbangan teknis tentang kesesuaian tata ruang yang mengacu pada rencana tata ruang, digunakan sebagai salah satu persyaratan wajib perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang dalam satu kawasan pemerintah daerah pada periode tertentu.
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendeskripsikan pemenuhan standar penataan ruang dan wilayah dalam prosedur pemberian izin pemanfaatan lahan dalam satu kawasan dalam satu periode tertentu.
Tipe Pengukuran	:	Cakupan /prosentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	Program Penyelenggara dan Penataan Ruang
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.27
Capaian Kinerja Persentase Kesesuaian Pertimbangan Teknis
Tata Ruang Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	Cakupan (%)	68,14 %	68,52%	Memuaskan	55,98%
Capaian Kinerja Sasaran 12				84	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.27 diatas dapat diuraikan bahwa:
- capaian Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang tahun 2023 telah melebihi target tahunan yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut juga memberikan data bahwa telah maksimalnya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan Kepatuhan masyarakat dan Pengelola Lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap RTRW dan RDTR.
- Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang perencanaan tata ruang.
b. Adanya anggaran narasumber yang berlebih.
c. Penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu melakukan upaya upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur di bidang perencanaan tata ruang.
 - Pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat



- terkait perencanaan tata ruang
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program di atas mencapai Rp 149.629.761,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp102.533.200,000 atau 68,52% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 16

- Sasaran Strategis : Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan terpadu
- Indikator Kinerja Utama : Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik
- Definisi Operasional IKU : Alat ukur untuk mendeskripsikan Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang *jalan* secara keseluruhan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyediaan infrastruktur dasar panjang jalan dalam kondisi baik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu periode tertentu
- Tipe Pengukuran : Cakupan /presentase
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Penyelenggaraan Jalan



Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Penanggung jawab
 (Langsung)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Cakupan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 Dan Periode RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Cakupan (%)	81,00	98,21	Memuaskan	30,86
Capaian Kinerja Sasaran 11				121,47	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.28 diatas dapat diuraikan bahwa:

- capaian kondisi Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan dalam tahun 2023, dan mengalami peningkatan yang jauh dibandingkan dengan data tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi telah optimalnya upaya pemerintah daerah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek pemenuhan kualitas infrastruktur jalan dalam kondisi baik .

Faktor Penyebab :
 Tercapainya Target : • Meningkatnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis di bidang Jalan dan Jembatan.



- Tercukupinya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan.
- Telah optimalnya integrasi pengelolaan infrastruktur perekonomian seperti jalan, jembatan, listrik dan air
- Peningkatan kemampuan alokasi anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah sarana/prasarana infrastruktur kabupaten yang membutuhkan penanganan teknis
- Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk merawat infrastruktur daerah
- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak

Upaya Perbaikan
peningkatan Kinerja

dan : Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di atas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya-upaya pada tahun 2024 antara lain :

- Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi: penentuan nilai International Roughness Index (IRI)/Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan).
- Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan.
- Mendorong pengembangan wilayah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan



alokasi khusus anggaran

- Pengambilan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas selaras dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk membangun *good governance*
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan melalui instrumen forum musrenbang pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
- Menambah jumlah sumberdaya manusia sebagai pengawas lapangan untuk kegiatan bidang kebinamargaan dan keciptakarya.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian kualitas cakupan Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 130.538.626.642,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 128.200.342.192,00 atau 98,21 % dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 17

Sasaran Strategis	: Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan terpadu
Indikator Kinerja Utama	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan



- Definisi Operasional IKU : Alat ukur untuk mendeskripsikan persentase pemenuhan jumlah sarana prasarana yang dibangun dibandingkan dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu periode tertentu.
- Tipe Pengukuran : Cakupan /prosentase
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Perangkat Daerah Penanggung jawab (Langsung) : Dinas Perhubungan

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.30
Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	Cakupan (%)	50,23	25,61	Agak Kurang	0,44
Capaian Kinerja Sasaran 11				50,96	

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.30 diatas dapat diuraikan bahwa: capaian kondisi cakupan Persentase



pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan belum mencapai target yang ditetapkan dalam tahun 2023 dan meningkat dari capaian tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi belum optimalnya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek pemenuhan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan mengalami pertumbuhan yang membaik di tahun 2023.

- Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target :
- Tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan serta Kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan.
 - Tingkat gangguan samping akibat pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (Pedagang asongan dan Pedagang kaki lima).
 - Tingkat terbatasnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sehingga kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2023.
 - Tingkat kebutuhan data sarana dan prasarana perhubungan yang belum dapat dikelola dengan baik sehingga target pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan tidak optimal.
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja :
- Untuk meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya-upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Pemasangan dan pemeliharaan *warning light*, median/marka jalan, rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).



- Penataan sistem parkir (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*)
- Mengembangkan sistem transportasi daerah yang berjenjang dan terpadu melalui penataan manajemen transportasi, mendorong peningkatan investasi di sektor angkutan umum massal, modernisasi moda dan prasarana serta penataan kelembagaan dan SDM
- Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didukung oleh personil yang memadai, khususnya di persimpangan dan ruas jalan yang padat lalu lintasnya, karena penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit capaian Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 20.209.850.419,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 18.980.501.821,00 atau 93,92% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 18

Sasaran Strategis : Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatnya kawasan pemukiman yang tidak kumuh



- Indikator Kinerja Utama : Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan
- Definisi Operasional IKU : Alat ukur untuk mendeskripsikan Persentase jumlah sarana prasarana dan utilitas perumahan dibandingkan dengan jumlah seluruh sarana prasarana dan utilitas perumahan.yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dibandingkan dengan jumlah seluruh sarana prasarana dan utilitas perumahan. yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu periode tertentu
- Tipe Pengukuran : Cakupan /prosentase
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- Perangkat Penanggung Jawab (Langsung) Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.31
Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan	Cakupan (%)	77	68	88,31	52



Capaian Kinerja Sasaran 11		
-----------------------------------	--	--

Sumber data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.31 diatas dapat diuraikan bahwa capaian Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan belum memenuhi target tahun 2023, tetapi mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi belum optimalnya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan juga tidak mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2019 hingga 2023.
- Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target : • Keterbatasan anggaran untuk memenuhi target unit pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum
- Perencanaan dan data belum optimal dalam memenuhi target
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya-upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Pemilihan data dan penentuan perencanaan untuk memenuhi target pemilihan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum daerah kawasan kumuh
- b. Pemenuhan anggaran dari berbagi sektor untuk mengakomodir rencana kegiatan dan target
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas



perumahan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit
 Pengungkit IKU : Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 222.875.000,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 222.168.100,00 atau 99,68% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 19

Sasaran Strategis	:	Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta meningkatkanya kawasan pemukiman yang tidak kumuh
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase pemukiman yang tidak kumuh
Definisi Operasional IKU	:	Alat ukur untuk mendeskripsikan pemenuhan Persentase pemukiman yang layak huni yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu periode tertentu
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menaikkan persentase pemukiman yang tidak kumuh adalah persentase pemukiman yang layak huni yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu periode tertentu
Tipe Pengukuran	:	Cakupan /Prosentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Perumahan • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	Daerah :	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :



Tabel 3.32
Capaian Kinerja Persentase Pemukiman Yang Tidak Kumuh
Tahun 2023 Dan Periode RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase pemukiman yang tidak kumuh	Cakupan (%)	71,5	87	121,68	67
Capaian Kinerja Sasaran 11					

Sumber data : Sumber data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.32 diatas dapat diuraikan bahwa capaian Persentase pemukiman yang tidak kumuh tahun 2023 sudah melebihi target tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi telah optimalnya upaya pemerintah daerah dalam perbaikan dan peningkatan Persentase pemukiman yang tidak kumuh bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek Persentase pemukiman yang tidak kumuh juga belum mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2021 hingga 2023.

Faktor Penyebab Tercapai Target :

- Telah dilaksanakannya sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar rumah kepa masyarakat
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar rumah
-



- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Mengalokasikan dana APBD yang seharusnya Signifikan dengan data rumah tidak layak huni tersebut.
 - Pendataan yang akurat dari lapangan
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Persentase pemukiman yang tidak kumuh. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari 2 (dua) program prioritas pengungkit capaian Persentase pemukiman yang tidak kumuh diketahui bahwa total alokasi anggaran pada keempat program diatas mencapai Rp 4.947.247.248,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 4.573.090.109,00 atau 92,44% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 20

- Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas air
- Indikator Kinerja Utama : Indeks kualitas air
- Definisi Operasional IKU : Alat ukur dengan metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal.dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendeskripsikan Indeks kualitas air pada lingkup dan periode tertentu dalam satu periode tertentu.
- Tipe Pengukuran : Indeks



Beberapa Program Prioritas : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Pengungkit IKU (pengungkit langsung) Kerusakan Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Penanggung jawab :
(Langsung)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanabtu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indeks kualitas air
Tahun 2023 dan Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Indeks kualitas air	Indeks	53,91 %	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	70,00%
Capaian Kinerja Sasaran 13				-	

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.33 diatas menginformasikan bahwa capaian Indeks kualitas air tahun 2023 tidak tersedia dikarenakan tidak terdapat satu parameter wajib yang tidak dilakukan pengujiannya. Tidak tersedianya data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk tahun 2024 dalam upaya perbaikan Indeks kualitas air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Faktor Pendukung : Meskipun data indeks kualitas air di Labuhanbatu Selatan mengalami kendala dalam pengukuran, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap berkomitmen untuk meningkatkan capaian Indeks kualitas air sebagai upaya perbaikan yang



terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak terkait lainnya melalui :

- Telah tersedianya anggaran untuk melakukan pengujian kualitas air sungai pada 2 lokasi sungai.
- Perusahaan melakukan pemantauan terhadap air limbah yang dihasilkan secara aktif sebelum dibuang ke badan air untuk menjaga kualitas air sungai.

Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya upaya pada tahun 2024 antara lain :

- Meningkatkan kualitas air pada titik pantau.
- Meningkatkan Pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup.
- Mengedukasi masyarakat tentang bahaya pencemaran air serta upay-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan indeks kualitas air.
- Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan hidup.

Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Indeks kualitas air. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari satu program prioritas pengungkit capaian kualitas Indeks kualitas air diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 35.264.394,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 27.302.500,00 atau 77,42%.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 22

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas udara



- Indikator Kinerja Utama : Indeks kualitas udara
- Definisi Operasional IKU : Alat ukur Indeks kualitas udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendeskripsikan Indeks kualitas udara pada lingkup dan periode tertentu dalam satu periode tertentu.
- Tipe Pengukuran : Indeks
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Perangkat Penanggung Jawab (Langsung) Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Kualitas Udara*”, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.35
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara
Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Indeks kualitas udara	Indeks	88,40 %	93,3%	Memuaskan	92,22%
Capaian Kinerja Sasaran 13				105,54	

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup, 2023



ANALISIS DAN EVALUASI

- Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.35 diatas dapat diuraikan bahwa capaian Indeks kualitas udara tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan dan juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan Indeks kualitas udara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek capaian Indeks kualitas udara juga mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2022 hingga 2023.
- Faktor Pendukung Keberhasilan : Peningkatan capaian Indeks kualitas udara merupakan bentuk upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak terkait lainnya melalui :
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung secara aktif untuk melaksanakan pemenuhan target Indeks Kualitas Udara dengan mengakomodir semua peralatan pengujian sampel kualitas udara dengan metode passive sampler setiap tahunnya.
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan pengambilan sampel uji kualitas udara pada 4 (empat) titik lokasi.
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya upaya pada tahun 2023 antara lain :
- Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.



- Memberikan edukasi bagi masyarakat terkait kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam peningkatan indeks kualitas udara.
 - Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim.
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Indeks kualitas udara. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari satu program prioritas pengungkit capaian kualitas Indeks kualitas udara diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 35.264.394,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 27.302.500,00 atau 77,42%.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 23

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kualitas tutupan lahan
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Tutupan Lahan
Definisi Operasional IKU	:	Alat ukur untuk mendeskripsikan Indeks tutupan lahan yaitu nilai yang menggambarkan kualitas <i>Tutupan Lahan</i> yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada lingkup dan periode tertentu
Tujuan Penggunaan IKU	:	Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendeskripsikan indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
Tipe Pengukuran	:	Persentase
Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung)	:	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Perangkat Penanggung Jawab (Langsung)	Daerah :	Dinas Lingkungan Hidup jawab



Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya kualitas tutupan lahan*” Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.36
Capaian Kinerja Indeks Tutupan Lahan
Tahun 2023 dan Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Indeks Tutupan Lahan	Cakupan (%)	36,16 %	29,05%	Sangat Baik	28,64%
Capaian Kinerja Sasaran 13				80,34	

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup.

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.36 diatas dapat diuraikan bahwa capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2023 belum memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan tetapi mengalami peningkatan disbanding capaian tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi belum optimalnya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam meningkatkan Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek capaian Indeks Tutupan Lahan juga belum mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2022 hingga 2023.



- Faktor Penyebab Tidak Terpenuhi Target : a. Belum terinventarisasinya seluruh lokasi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
b. Tutupan lahan yang sudah ditanam belum tumbuh sesuai dengan ukuran tegakan yang dapat dijadikan kriteria indeks tutupan lahan.
- Upaya Perbaikan dan peningkatan Kinerja : Untuk meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
 - Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa
 - Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi
- Umpan Balik Tahun 2024 : Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan indeks tutupan lahan. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)
- Kajian efisiensi Program Pengungkit IKU : Bahwa dari satu program prioritas pengungkit capaian indeks tutupan lahan diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 137.818.648,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 135.249.000,00 atau 98,14%.

IDENTITAS KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 23

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Indikator Kinerja Utama : Persentase jumlah sampah yang ditangani
- Definisi Operasional IKU : Alat ukur untuk mengetahui Persentase jumlah sampah yang ditangani dengan cara Total Volume sampah yang dapat ditangani dibandingkan dengan total timbunan sampah



- kabupaten/kota pada lingkup dan periode tertentu
- Tujuan Penggunaan IKU : Mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendeskripsikan indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari Persentase jumlah sampah yang ditangani pada lingkup dalam satu periode tertentu.
- Tipe Pengukuran : Cakupan /prosentase
- Beberapa Program Prioritas Pengungkit IKU (pengungkit langsung) : Program Pengelolaan Persampahan
- Perangkat Penanggung Jawab (Langsung) Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Persentase jumlah sampah yang ditangani*” Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Berikut ini disajikan capaian kinerja pada indikator utama bersangkutan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dan periode sampai dengan Tahun ketiga (2021-2026) sebagai berikut :

**Tabel 3.37
Capaian Kinerja Persentase Jumlah Sampah Yang Ditangani
Tahun 2023 Dan Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Persentase jumlah sampah yang ditangani	Cakupan (%)	60,58 %	11,21%	Sangat Kurang	9,19%
Capaian Kinerja Sasaran 13				18,50	

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian Kinerja : Berdasarkan Tabel 3.37 diatas dapat diuraikan bahwa:



capaian Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2023 belum memenuhi target tahun tersebut tetapi mengalami peningkatan capaian tahun 2022. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi belum optimalnya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan Persentase jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perkembangan selama periode RPJMD pada aspek capaian Persentase jumlah sampah yang ditangani juga belum mengalami pertumbuhan yang membaik sejak 2020 hingga 2023.

- Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target :
- Penangan sampah belum memadai, pelaksanaan pengelolaan sampah masih sebatas angkat buang dan lokus utama pusat kota kabupaten dan kota kecamatan.
 - Minimnya Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah secara umum dan secara khusus akses jalan menuju TPA dan kurangnya alat berat di TPA.
 - Kurangnya sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat
 - Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat sulit menerima perubahan misalnya membiasakan diri buang sampah tidak di sembarang tempat, sampah organik dijadikan kompos.
- Upaya Perbaikan peningkatan Kinerja dan :
- Untuk meningkatkan capaian kinerja diatas maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu melakukan upaya-upaya pada tahun 2024 antara lain :
- Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah
 - Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan
- Umpan Balik Tahun 2024 :
- Telah diagendakan pada rencana aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dinas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam peningkatan Persentase



jumlah sampah yang ditangani. (terlampir pada Dokumen LKIP perangkat Daerah)

Kajian efisiensi Program : Bahwa dari 1 (satu) program prioritas pengungkit
Pengungkit IKU : capaian kualitas cakupan Persentase jumlah sampah yang ditangani diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp 3.458.061.278,00 dan telah terealisasi hanya sebesar Rp 3.339.409.691,00 atau 96,57%.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Keuangan Tahun 2023

Dalam rangka mendukung program program pembangunan selama tahun 2023 dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fokus prioritas pendanaan dan penggunaan APBD Tahun 2023 telah ditetapkan dan dirumuskan serta disepakati dalam Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara. Selanjutnya Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai perencanaan keuangan yang akan dipedomani dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut dibawah ini disajikan realisasi keuangan tahun 2023 yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023



Tabel 3.38
Realisasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023

KODE REKINING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	987.326.560.558,00	982.118.225.151,37	99,47	919.303.211.450,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.612.910.536,00	64.945.075.068,37	93,29	59.867.478.675,98
4.1.01	Pajak Daerah	39.608.049.032,00	29.710.530.161,00	75,01	26.711.754.866,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.136.097.200,00	2.335.188.528,00	74,46	1.703.013.119,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.030.523.750,00	2.912.098.570,00	96,09	2.728.424.304,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.838.240.554,00	29.987.257.809,37	125,79	28.724.286.386,98
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	917.713.650.022,00	917.173.150.083,00	99,94	859.435.732.775,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.556.496.741,00	830.116.681.402,00	99,95	788.119.271.080,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	754.224.420.741,00	753.784.605.402,00	99,94	731.141.184.080,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	16.994.463.000,00	16.994.463.000,00	100,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	59.337.613.000,00	59.337.613.000,00	100,00	56.978.087.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.157.153.281,00	87.056.468.681,00	99,88	71.316.461.695,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.157.153.281,00	60.157.153.281,00	100,00	54.131.152.952,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	27.000.000.000,00	26.899.315.400,00	99,63	17.185.308.743,00
5	BELANJA DAERAH	1.144.450.271.076,00	1.004.748.748.394,30	87,79	935.902.110.791,06
5.1	BELANJA OPERASI	768.711.328.071,00	647.503.925.756,78	84,23	586.193.713.980,00
5.1.01	Belanja Pegawai	395.717.748.504,00	319.187.079.651,00	80,66	310.411.153.933,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.389.395.967,00	285.680.793.021,24	86,99	257.531.625.047,00
5.1.05	Belanja Hibah	43.799.183.600,00	42.001.053.084,54	95,89	17.890.935.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	805.000.000,00	635.000.000,00	78,88	360.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	244.657.830.483,00	237.425.862.140,88	97,04	226.709.541.203,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.605.998.725,00	43.075.376.645,00	90,48	46.738.007.594,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.634.417.499,00	32.549.482.472,14	96,77	20.931.895.941,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.849.502.149,00	153.253.080.784,74	98,97	151.995.750.834,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.017.912.110,00	7.997.922.239,00	99,75	7.043.886.834,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.145.201.199,00	578.690.592,00	6,33	1.015.284.375,00

**PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.145.201.199,00	578.690.592,00	6,33	1.015.284.375,00
5.4	BELANJA TRANSFER	121.935.911.323,00	119.240.269.904,64	97,79	121.983.571.233,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.274.414.623,00	2.550.928.743,00	59,68	2.117.638.790,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.661.496.700,00	116.689.341.161,64	99,17	119.865.932.443,00
	SURPLUS / DEFISIT	(157.123.710.518,00)	(22.630.523.242,93)	0	(16.598.899.340,08)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	159.363.610.518,00	159.363.610.518,24	100,00	177.962.509.858,32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.363.610.518,00	159.363.610.518,24	100,00	177.962.509.858,32
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.239.900.000,00	2.239.900.000,00	100,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.239.900.000,00	2.239.900.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	157.123.710.518,00	157.123.710.518,24	100,00	175.962.509.858,32
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	134.493.187.275,31	0	159.363.610.518,24



2. Realisasi Program Pengungkit Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2023

**Tabel 3.39
Realisasi Program Pengungkit Indikator Kinerja Utama RPJMD
Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA Dan PERKADA Yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.401.388.444,00	3.155.703.311,00	92,78%
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.107.466.300,00	2.995.200.000,00	96,39%
TOTAL				6.508.854.744,00	6.150.903.311,00	94,50%
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.426.249.850,00	32.061.852.967,00	57,85%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.639.478.759,00	168.075.222,00	10,25%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	924.435.340,00	399.620.753,00	43,23%
			Program Pengendalian Penduduk	61.995.092,00	59.648.692,00	96,22%
TOTAL				58.052.159.041,00	32.689.197.634,00	56,31%
3	Meningkatnya Kualitas	Rata-Rata Lama Sekolah		110.388.505.066,00	54.619.092.773,00	49,48%



	Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Program pengelolaan Pendidikan			
TOTAL				104.328.009.846,00	47.791.277.156,00	49,48%
4	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	766.339.400,00	610.449.371,00	79,66%
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	626.708.911,00	555.693.000,00	88,67%
TOTAL				1.393.048.311,00	1.166.142.371,00	83,71%
5	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.061.494.507,00	3.807.060.210,00	75,22%
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	519.782.094,00	419.662.539,00	80,74%
TOTAL				5.581.276.601,00	4.226.722.749,00	75,73%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133.715.429.922,00	62.855.349.305,64	47,01%
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	798.240.068,00	599.292.023,00	75,08%
TOTAL				134.513.669.990,00	63.454.641.328,64	47,17%
7	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.248.704.368,00	1.245.304.000,00	99,73%
TOTAL				1.248.704.368,00	1.245.304.000,00	99,73%
8	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Kepada Masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.248.704.368,00	1.245.304.000,00	99,73%
			Program Pencatatan Sipil	195.820.932,00	172.058.476,00	87,87%



			Program Pelayanan Penanaman Modal	70.645.567,00	68.222.248,00	96,57%	
TOTAL				1.515.170.867,00	1.485.584.724,00	98,05%	
9	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	#	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	239.320.000,00	203.189.054,00	84,90%
			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Program Perizinan Usaha Pertanian	82.266.650,00	47.542.000,00	58%
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	387.637.610,00	327.697.000,00	84,54%
TOTAL				709.224.260,00	578.428.054,00	60,91%	
10	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	459.103.207,00	254.440.050,00	55,42%	
			Program Pelayanan Penanaman Modal			70.645.567,00	68.222.248,00
TOTAL				529.748.774,00	322.662.298,00	60,91%	
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha Bagi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.016.551.540,00	1.006.532.325,00	99,86%	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.191.220.185,00	1.161.389.037,00	97,50%	
TOTAL				2.207.771.725,00	2.167.921.362,00	98,19%	
12	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.652.058.167,00	4.045.126.250,00	71,57%	
TOTAL				5.652.058.167,00	4.045.126.250,00	71,57%	



13	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Yang Konsisten	Persentase Kesesuaian Pertimbangan Teknis Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	149.629.761,00	102.533.200,00	68,52%
TOTAL				149.629.761,00	102.533.200,00	68,52%
14	Tersedianya Infrastruktur Yang Aman, Nyaman, Dan Terpadu	# Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	130.538.626.642,00	128.888.279.400,00	98,74%
		# Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	20.209.850.419,00	18.980.501.821,00	93,92%
TOTAL				150.748.477.061,00	147.868.781.221,00	98,09%
15	Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Meningkatkan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Kumuh	# Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	222.875.000,00	222.168.100,00	99,68%
		# Persentase Pemukiman Yang Tidak Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.932.247.248,00	4.558.090.109,00	92,41%
TOTAL				5.170.122.248,00	4.795.258.209,00	92,75%
16	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35.264.394,00	27.302.500,00	77,42%



17	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
TOTAL				35.264.394,00	27.302.500,00	77,42%
18	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	137.818.648,00	135.249.000,00	98,14%
TOTAL				137.818.648,00	135.249.000,00	98,14%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Hijau Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Persentase Jumlah Sampah Yang Ditangani	Program Pengelolaan Persampahan	3.458.061.278,00	3.339.409.691,00	96,57%
TOTAL				3.458.061.278,00	3.339.409.691,00	96,57%



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Laporan Kinerja 2023. Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari dukungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap terselenggaranya sistem administrasi, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis, karena melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi umpan balik (*Feed Back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas



pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Laporan Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang ditunjukkan melalui pada Tahun Anggaran 2023. Walaupun terdapat beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target akibat adanya berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap optimis dapat meningkatkan capaian kinerja sesuai capaian yang telah ditargetkan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian pengukuran kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran dan indikator kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan Akuntabilitas Kinerja seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di masa mendatang Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan Kinerja yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum, terdapat 7 tujuan, 19 sasaran, dan 23 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023. Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dapat diinterpretasikan **Sangat Baik** (dengan kisaran Nilai **80%**).

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :



**Tabel 4.1
Ikhtisar Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2023**

No.	SASARAN	CAPAIAN %	INTERPRESTASI
1	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	100%	Memuaskan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	Memuaskan
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	99,37%	Memuaskan
4	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	66,67%	Cukup Baik
5	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	50%	Kurang
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	100%	Memuaskan
7	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	64,67%	Cukup Baik
8	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Kepada Masyarakat	99,57%	Memuaskan
9	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	100,61%	Memuaskan
10	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	74,09%	Baik
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha Bagi Masyarakat	73,45%	Baik
12	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	92,31%	Memuaskan
13	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Yang Konsisten	100,55%	Sangat Baik
14	Tersedianya Infrastruktur Yang Aman, Nyaman, Dan Terpadu	86,12%	Sangat Baik



15	Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Meningkatnya Kawasan Pemukiman Yang Tidak Kumuh	103,99%	Memuaskan
16	Meningkatnya Kualitas Air	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
17	Meningkatnya Kualitas Udara	105,54%	Memuaskan
18	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	80,34%	Sangat Baik
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Hijau Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	18,50%	Sangat Kurang
	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	80%	Sangat Baik

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sasaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 tingkat persentasenya **80%** dengan interpretasi **Sangat Baik** dan telah memenuhi sasaran yang telah ditargetkan. Berdasarkan skala ordinal, maka capaian kinerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dikategorikan berhasil.

Keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur *Stakeholder*, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur *Stakeholder* perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Reviu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 agar mampu



memberikan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun mendatang.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja berupa gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapan lainnya
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Penyusunan program kerja berdasarkan prioritas yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat
5. Pembentukan Indikator Kinerja Sasaran yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai serta dapat di ukur berdasarkan data rumus formulasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2023. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik yang membangun dan saran untuk perbaikannya dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke depannya akan mereviu RPJMD, terkait Sasaran dan Indikator



Kinerja yang tertuang di dalamnya karena masih banyaknya Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten. Demikianlah Laporan Kinerja ini disusun, kiranya dapat membantu dalam memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2023 serta dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di masa yang akan datang. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Laporan Kinerja pada tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi.



LAMPIRAN